

## Simulasi Siap Kerja Sebagai Staf Pajak Perusahaan kepada Siswa SMK Negeri 3 Depok

<sup>1</sup>Masripah, <sup>2</sup>Shinta Widyatuti, <sup>3</sup>Dianwicakasih Ariefiara, <sup>4</sup>Clarisa Diva Ramandani,  
<sup>5</sup>Samudra Sangga Lelana

<sup>1,4,5</sup>Program Studi D3 Akuntansi, UPN “Veteran” Jakarta, Jakarta Selatan

<sup>2</sup>Program Studi S1 Akuntansi, UPN “Veteran” Jakarta, Jakarta Selatan

<sup>3</sup>Program Studi S2 Akuntansi, UPN “Veteran” Jakarta, Jakarta Selatan

E-mail: <sup>1</sup>[masripah@upnvj.ac.id](mailto:masripah@upnvj.ac.id), <sup>2</sup>[author2@upnvj.ac.id](mailto:author2@upnvj.ac.id), <sup>3</sup>[dianwicakasih@upnvj.ac.id](mailto:dianwicakasih@upnvj.ac.id),  
<sup>4</sup>[2210102010@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2210102010@mahasiswa.upnvj.ac.id), <sup>5</sup>[2310102020@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2310102020@mahasiswa.upnvj.ac.id)

### ABSTRAK

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 tentang Transformasi Perhitungan Regulasi Pajak PPh Pasal 21 menjadi pembahasan utama dalam pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh Tim Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta. Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk simulasi siap kerja sebagai staf pajak perusahaan kepada siswa SMK Negeri 3 Depok dengan harapan siswa memiliki pemahaman yang komprehensif dan siap menghadapi regulasi yang terus berkembang. Setelah implementasi atau simulasi dan diskusi, data dikumpulkan melalui post-test untuk mengevaluasi efektivitas kegiatan dalam mengenalkan dan mengembangkan pemahaman regulasi pajak terbaru. Hasilnya menunjukkan bahwa simulasi siap kerja melalui Kegiatan Abdimas dirasa oleh hampir semua murid (97% dari peserta abdimas) setuju bahwa dengan simulasi atau praktek langsung ini dapat membantu murid SMK dalam memahami konsep pajak lebih baik dibandingkan hanya belajar teori.

**Kata kunci :** *Peraturan Pemerintah, Abdimas, PPh Pasal 21*

### ABSTRACT

*Government Regulation Number 58 of 2023 regarding the Transformation of the Calculation of Income Tax Article 21 has become the main topic of discussion in the community service conducted by the team from the National Development University "Veteran" Jakarta. The activity was carried out in the form of a work readiness simulation for corporate tax staff for students of SMK Negeri 3 Depok, with the hope that the students would have a comprehensive understanding and be prepared to face the continuously evolving regulations. After the implementation or simulation and discussion, data was collected through a post-test to evaluate the effectiveness of the activities in introducing and developing an understanding of the latest tax regulations. The results show that the work-ready simulation through Community Service Activities is felt by almost all students (97% of community service participants) to agree that this simulation or hands-on practice can help vocational school students understand tax concepts better than just learning theory.*

**Keyword :** *Government Regulation, Community Service, Income Tax 21*

## 1. PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan bisnis dan perubahan regulasi peraturan yang dinamis, kebutuhan akan pemahaman dan *update* dengan perubahan peraturan atau regulasi yang terbaru menjadi sangat penting, terutama bagi generasi muda. Teknologi yang semakin mudah untuk diakses menjadi harapan besar bagi perataan informasi kepada seluruh golongan masyarakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 membawa perubahan signifikan terhadap penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang akan mulai diberlakukan pada Januari 2024 (Maulida, 2024). Perubahan peraturan ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan kepatuhan warga negara dalam pengelolaan pajak, serta memberikan kepastian hukum bagi seluruh wajib pajak.

Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 tentang perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 ini tidak hanya berdampak pada karyawan perusahaan yang bertanggung jawab untuk urusan pajak/legal, namun juga mempengaruhi siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), khususnya di jurusan akuntansi dan perbankan yang nantinya diharapkan setelah lulus akan bekerja di bidang yang erat kaitannya dengan perpajakan.

Sosialisasi perpajakan merupakan sebuah upaya dari pemerintah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan ketentuan yang berlaku. Sosialisasi perpajakan biasanya diselenggarakan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dengan tujuan agar informasi dapat disampaikan secara merata dan masyarakat sadar akan adanya kewajiban perpajakan. Menurut Vionita & Kristanto, n.d. (2018), Sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap

kepatuhan perpajakan. Sosialisasi perpajakan memberikan pengetahuan dan pemahaman bagi seluruh calon wajib pajak, sehingga terjadi kepatuhan perpajakan.

Pembelajaran atas peraturan perpajakan tidak hanya menjadi tanggung jawab para praktisi pajak profesional, tetapi juga harus menjadi bagian dari kurikulum instansi pendidikan, khususnya bagi siswa sekolah menengah kejuruan jurusan akuntansi dan perbankan. Oleh karena itu, perlu adanya upaya lebih untuk meningkatkan pemahaman siswa SMK atas perpajakan. Pelatihan yang diberikan kepada siswa SMK tidak hanya memberikan manfaat bagi individual, namun juga berpotensi untuk memberikan dampak positif yang luas terhadap pengembangan sumber daya manusia (Wi et al., 2023).

Juliana et al., (2023) menjelaskan bahwa Pengetahuan Pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini menjelaskan bahwa dengan adanya sosialisasi yang dilakukan terhadap siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), diharapkan bahwa pengetahuan atas perpajakan dapat membentuk siswa untuk menjadi calon Wajib Pajak yang patuh.

Pemahaman melalui simulasi dan pelatihan pengisian SPT Tahunan secara manual dan e-SPT melalui contoh kasus juga dapat menjadi solusi yang dapat dilakukan atas permasalahan terhadap peraturan perpajakan yang kerap terjadi, seperti permasalahan atas ketidaktahuan perubahan peraturan hingga kebingungan atas pengisian laporan SPT (Okfitasari et al., 2022).

Untuk itu, sosialisasi atas Peraturan Perpajakan perlu dilaksanakan oleh dosen maupun tenaga pengajar di bidang perpajakan untuk membantu mendistribusikan informasi perpajakan

kepada masyarakat luas, serta sebagai upaya untuk memberikan bekal yang cukup bagi para siswa SMK jurusan Akuntansi dan Perbankan sebelum terjun ke dunia kerja.

Pelatihan dan sosialisasi dilakukan semenarik mungkin, dapat melalui seminar, workshop, dan pelatihan praktis, seperti simulasi, dimana dosen dan tenaga pengajar di bidang perpajakan dapat bekerjasama dengan sekolah-sekolah menengah kejuruan untuk menyusun dan mengadakan program pelatihan dengan menggunakan teknologi dan platform online, sehingga diharapkan dapat memperluas jangkauan kegiatan sosialisasi.

Dengan demikian, perlu adanya sosialisasi dosen serta mahasiswa jurusan akuntansi sebagai bentuk pengabdian masyarakat untuk memberikan simulasi dalam suatu perusahaan dan bagaimana staf bagian pajak dapat menghitung Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terbaru. Kegiatan sosialisasi yang dibentuk akan menciptakan sinergi positif berbagai pihak, baik antara akademisi, mahasiswa, dan para siswa.

## 2. PERMASALAHAN MITRA

Permasalahan yang dihadapi oleh siswa, khususnya di murid SMK jurusan akuntansi, sangat relevan dalam konteks perkembangan regulasi perpajakan yang terus berubah. Siswa-siswi ini diharapkan memiliki pemahaman yang memadai tentang peraturan perpajakan, mengingat peran mereka yang nantinya akan terjun langsung di dunia kerja sebagai staf pajak atau keuangan di berbagai perusahaan.

Namun, dalam praktiknya, masih terdapat kesenjangan antara teori yang diajarkan di sekolah dengan aplikasi nyata di lapangan. Siswa sering kali hanya dibekali dengan teori dasar tanpa diberikan pemahaman yang mendalam

tentang bagaimana perubahan regulasi perpajakan, seperti transformasi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, dapat mempengaruhi proses administrasi pajak di perusahaan. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 yang membawa perubahan signifikan dalam perhitungan PPh Pasal 21, menjadi salah satu contoh nyata dari regulasi yang harus dipahami dengan baik oleh calon praktisi pajak.

Dalam hal ini, SMK Negeri 3 Depok sebagai lembaga pendidikan kejuruan memiliki tantangan tersendiri. Meskipun kurikulum yang diajarkan sudah mencakup materi perpajakan, tetapi seringkali materi tersebut belum mencerminkan perubahan regulasi terkini. Siswa lebih banyak dibebani dengan hafalan dan teori, tanpa kesempatan yang cukup untuk mempraktikkan keterampilan yang relevan, terutama dalam hal perhitungan dan pelaporan pajak berdasarkan regulasi terbaru.

Selain itu, minimnya akses terhadap pelatihan atau simulasi berbasis kasus nyata yang mencerminkan situasi di dunia kerja juga menjadi permasalahan utama. Siswa tidak hanya membutuhkan pengetahuan tentang peraturan pajak, tetapi juga harus dilatih untuk berpikir kritis dan mampu menyelesaikan permasalahan yang mungkin timbul saat menerapkan peraturan tersebut. Tanpa adanya pelatihan yang memadai, lulusan SMK akan menghadapi kesulitan dalam beradaptasi dengan tuntutan pekerjaan di bidang pajak, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kinerja mereka di dunia kerja.

Oleh karena itu, penting bagi sekolah-sekolah kejuruan seperti SMK Negeri 3 Depok untuk berkolaborasi dengan institusi pendidikan tinggi atau profesional di bidang perpajakan guna memberikan pelatihan yang komprehensif dan berbasis simulasi nyata. Pelatihan ini tidak hanya akan mengurangi kesenjangan

antara teori dan praktik, tetapi juga mempersiapkan siswa untuk menjadi tenaga kerja yang kompeten dan siap bersaing di pasar kerja.

Dengan memahami permasalahan ini, diharapkan program simulasi yang dirancang dapat memberikan solusi yang tepat dan meningkatkan kualitas pendidikan vokasi di bidang perpajakan, sehingga siswa SMK dapat menjadi calon tenaga kerja yang tidak hanya kompeten dalam hal teori, tetapi juga terampil dalam praktik perpajakan yang sesuai dengan regulasi terbaru

### 3. METODOLOGI

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2024 di SMK Negeri 3 Depok. Metode simulasi dipilih agar siswa dapat berlatih menghitung Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2023 yang berlaku sejak Januari 2024. Materi simulasi siap kerja sebagai staf pajak yang diberikan adalah latar belakang terjadinya perubahan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan menjelaskan skema perhitungan yang baru kepada siswa/siswi kelas 11 SMK Negeri 3 Depok yang berjumlah 70 siswa.

Kegiatan pengabdian masyarakat diawali dengan sambutan dari ketua tim dan penyampaian tujuan kegiatan, kemudian dilakukan pretest untuk mengukur pemahaman awal siswa/siswi mengenai Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Kegiatan selanjutnya dilakukan penyampaian materi yang dilakukan oleh Tim Dosen Pengabdian Masyarakat UPNVJ, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab.

Tahapan berikutnya adalah simulasi perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2023

sesuai dengan materi yang telah disampaikan sebelumnya dengan bantuan dari 2 orang mahasiswa D3 Akuntansi UPNVJ, kemudian diakhiri dengan evaluasi post test. Tim abdimas yang diketuai oleh bu Masripah, S.E., M.S.Ak., CPSAK, FAF, beranggotakan bu Shinta Widyastuti, SE, Ak, M.Acc, CA., dan Dr. Dianwicakasih Ariefiara, SE., Ak., M.Ak., CA., CSRS., serta mahasiswa D3 Akuntansi yaitu Clarisa Diva Ramandani dan Samudra Sangga Lelana.

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Simulasi siap kerja sebagai staf pajak perusahaan dilakukan dengan kolaborasi dosen, mahasiswa dan dua murid SMK yang diminta untuk maju sebagai karyawan di suatu perusahaan. Simulasi dilaksanakan sesuai dengan gambaran yang ada di buku saku yang dibuat oleh mahasiswa dan dosen FEB UPN "Veteran" Jakarta.



Gambar 1. Buku Saku  
Sumber : Dokumentasi Pribadi

Dimana mahasiswa membantu *share screen* buku saku dengan proyektor dan mendokumentasikan kegiatan, dosen sebagai staf bagian pajak, dua murid sebagai karyawan yang merasa gaji bulan januari tahun 2024 dipotong pajak penghasilan 21 yang berbeda dengan bulan desember tahun 2023 yang lalu. Kemudian murid sebagai karyawan perusahaan mempertanyakan terkait perbedaan nilai PPh ps 21 yang mereka terima. Dosen sebagai staf bagian pajak menjelaskan terkait aturan tersebut dan memberikan contoh perhitungan.



Gambar 2. Simulasi Siap Kerja  
Sebagai Staff Pajak  
Sumber : Dokumentasi Pribadi

Murid mensimulasikan dengan mengkonfirmasi perhitungan dari gaji mereka masing-masing yang keterangan lebih lanjut sudah dijelaskan pada buku saku. Pada akhir simulasi dilakukan diskusi dan para murid diminta untuk mengisi gform sebagai bahan evaluasi dari simulasi.

Data post-test yang dikumpulkan menjadi gambaran jelas mengenai efektivitas metode simulasi yang diterapkan. Sebanyak 90% murid SMK sebagai peserta abdimas menyatakan lebih memahami materi PPh pasal 21 setelah mengikuti simulasi perhitungan pajak yang dipotong dari gaji karyawan.



Gambar 3. Peserta Siswa SMK Negeri  
3 Depok  
Sumber : Dokumentasi Pribadi

Dan hampir semua murid SMK atau 97% dari peserta abdimas setuju bahwa dengan simulasi atau praktek langsung ini dapat membantu murid SMK dalam memahami konsep pajak lebih baik dibandingkan hanya belajar teori, dapat

mengetahui cara menghitung PPh pasal 21 secara detail, serta memberikan gambaran nyata tentang bagaimana staf pajak bekerja. Meskipun masih ada murid (24% peserta abdimas) yang merasa belum percaya diri dalam menjelaskan perhitungan PPh pasal 21 setelah praktek ini. Ada kemungkinan hal ini dikarenakan murid SMK Negeri 3 Depok yang menjadi peserta abdimas memang belum mendapatkan pelajaran terkait perpajakan di kelas.

Analisis dari beberapa pertanyaan yang dijawab oleh murid SMK Negeri 3 Depok atau peserta abdimas, dapat disimpulkan juga bahwa sebagian besar murid (93% peserta abdimas) menjadi tertarik untuk belajar lebih dalam tentang perpajakan. Peserta abdimas setuju bahwa metode pengajaran seperti simulasi dan praktek ini harus lebih sering dilakukan di sekolah. Selain itu, simulasi ini juga dapat membuat murid lebih memahami pentingnya pemotongan pajak dari gaji karyawan.

## 5. KESIMPULAN

Secara keseluruhan, simulasi yang dilakukan berhasil meningkatkan pemahaman siswa di berbagai bidang terkait perpajakan. Meskipun ada beberapa area yang memerlukan penekanan lebih lanjut, hasil dari evaluasi menunjukkan bahwa metode ini efektif dalam memperkuat pemahaman siswa dan mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan perpajakan di dunia kerja.

Hasil evaluasi ini juga memberikan indikasi bahwa materi yang disampaikan melalui metode simulasi dapat membantu siswa dalam memahami peraturan yang kompleks, terutama dalam konteks penghitungan pajak penghasilan pasal 21 sesuai dengan regulasi terbaru. Simulasi ini menjadi alat yang penting dalam

menjembatani kesenjangan antara teori yang diajarkan di kelas dan praktik nyata yang akan mereka hadapi di dunia kerja.

## 6. UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UPN "Veteran" Jakarta atas dukungan dan hibah internal yang diberikan untuk pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (Abdimas) ini. Dukungan tersebut sangat berharga dalam membantu kami mewujudkan program-program yang bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Semoga kerja sama yang baik ini dapat terus terjalin dan memberikan kontribusi positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan kesejahteraan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, M., & Rahmawati, I. (2024). Sosialisasi Pentingnya Pengetahuan Perpajakan Dalam Meningkatkan Kualitas Siswa Kelas Xii Smkn 1. *Tridaya: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 1–6.
- Harahap, S. (2023). Kajian Komparatif Manajemen Pajak Penghasilan Pasal 21 Berdasarkan Per 16 / Pj / 2016 Dan Pp 58 Tahun 2023 Tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan , Jasa , Atau Kegiatan Wajib. *Esensi Jurnal Manajemen Bisnis*, 26(3), 137–143.
- Maulida, R. (2024). *Peraturan Terbaru PPh 21 Karyawan (PMK 168/2023 & PP 58/2023)*. Online-Pajak.Com. <https://www.online-pajak.com/tentang-pph21/peraturan-terbaru-pph-21-karyawan-pmk-168-2023-pp-58-2023>
- Pemerintah Indonesia. (2007). *Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*. Indonesia. <https://www.pajak.go.id/id/undang-undang-nomor-28-tahun-2007>
- Pemerintah Indonesia. (2021). *Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. Indonesia. <https://peraturan.bpk.go.id/Detail/185162/uu-no-7-tahun-2021>
- Pemerintah Indonesia. (2023). *Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi*. Indonesia. <https://peraturan.bpk.go.id/Detail/274247/pp-no-58-tahun-2023>
- Wi, P., Anggraeni, R. D., Sulistiyowati, R., Melatnebar, B., Chandra, Y., & Trida. (2023). Pelatihan Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Pada Siswa Siswi Smk Setia Bhakti Tangerang. *Abdi Dharma*, 3(2), 179–188. <https://doi.org/10.31253/ad.v3i2.2299>

Juliana, E., Widagdo, S., & Ilmi, M. (2023). Jurnal RIEMBA. In *Tax Outreach* (Vol. 1, Issue 1).

Okfitasari, A., Santoso, D. T., & Rohmah, N. S. (2022). Pelatihan Pengisian Spt Tahunan Dan Meningkatkan Kompetensi Perpajakan Dengan Uu Harmonisasi Peraturan Perpajakan Bagi Guru Smk (Pkm Pada Smk Negeri 1 Karanganyar). *Jurnal BUDIMAS* (ISSN:2715-8926), 4(1).

Vionita, V., & Kristanto, B. S. (n.d.). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Adanya Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Perpajakan Bagi Prospective Taxpayer. In *JAKO-VOL* (Vol. 10).

